MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

# APU-PPT-PPPSPM (POJK 8/2023)

POJK | Nomor 8/2023 | Tahun 2023

> Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

**Berlaku sejak 14 Juni 2023**

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

**Mengatur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal di seluruh lembaga jasa keuangan.**

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 8/2023 mengganti POJK 12/POJK.01/2017 jo. 23/POJK.01/2019 agar sejalan dengan Rekomendasi FATF dan perkembangan teknologi (verifikasi nasabah tatap muka dan tanpa tatap muka secara elektronik). Bank, termasuk BPR/BPRS, wajib menerapkannya.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: APU-PPT-PPPSPM

Berlaku sejak 14 Juni 2023

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1 Program APU-PPT-PPPSPM wajib mencakup 5 pilar - pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta SDM dan pelatihan.

Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

2 Bank wajib menilai risiko pencucian uang/pendanaan terorisme atas nasabah, wilayah, produk, jasa, transaksi, dan jaringan distribusi, mendokumentasikannya, dan mengkinikannya berkala.

Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

3 Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab APU-PPT di kantor pusat dan cabang; pejabat ini hanya boleh merangkap fungsi manajemen risiko dan/atau kepatuhan.

Pasal 10 dan Pasal 13 Sumber: ojk.go.id

4 CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berlaku untuk semua jenis nasabah; ada juga CDD sederhana, dan CDD tidak boleh dialihdayakan ke pihak ketiga.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

5 Dana milik orang/korporasi dalam daftar terduga teroris (DTTOT) dan daftar pendanaan senjata pemusnah massal (DPPSPM) wajib diblokir seketika, tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Sumber: ojk.go.id

6 Dokumen data nasabah disimpan paling singkat 5 tahun sejak hubungan usaha berakhir; pegawai baru wajib disaring (pre-employee screening) dan pelatihan APU-PPT minimal 1 kali setahun.

Pasal 63, Pasal 71, Pasal 72 Sumber: ojk.go.id

7 Denda pelanggaran (selain pelaporan) paling banyak Rp5 miliar per tahun bagi perorangan, dan paling banyak 1% laba bersih tahun sebelumnya (maks. Rp100 miliar per tahun) bagi lembaga.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun dan memutakhirkan dokumen penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM (format sesuai lampiran POJK).
- Menunjuk pejabat atau unit kerja khusus APU-PPT yang bertanggung jawab kepada Direksi dan punya akses ke seluruh data nasabah.
- Melakukan CDD/EDD termasuk identifikasi Pemilik Manfaat, serta memblokir seketika dana nasabah yang masuk DTTOT/DPPSPM.
- Menyimpan dokumen nasabah minimal 5 tahun, menyaring pegawai baru, dan melatih pegawai minimal 1 kali setahun.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**Customer Service**

Saat buka rekening, lengkapi identitas nasabah dan Pemilik Manfaat; nasabah perseroan perorangan masuk kategori korporasi.

**Teller**

Waspadai transaksi tunai yang tidak sesuai profil nasabah dan laporkan ke pejabat APU-PPT tanpa memberi tahu nasabah.

**APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)**

Kinikan penilaian risiko, cek nasabah terhadap DTTOT/DPPSPM, dan pastikan pemblokiran dilakukan seketika.

**Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)**

Usulkan kebijakan APU-PPT ke Dewan Komisaris, bahas penerapannya di rapat Direksi, dan pastikan pelatihan tahunan berjalan.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## CDD

Customer Due Diligence, kegiatan mengenali dan memverifikasi identitas serta profil nasabah.

## Pemilik Manfaat

Orang yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan dana/nasabah (Beneficial Owner).

## DTTOT

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; dananya wajib diblokir seketika.

## PPSPM

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Apa yang harus dilakukan bila nasabah ternyata tercantum di DTTOT?**

JAWABAN

Dananya wajib diblokir seketika (freezing without delay) tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada nasabah.

TANYA 2

**Berapa lama dokumen data nasabah wajib disimpan?**

JAWABAN

Paling singkat 5 tahun sejak hubungan usaha/transaksi dengan nasabah berakhir.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 14 Juni 2023; mencabut POJK 12/POJK.01/2017 dan POJK 23/POJK.01/2019. Ketentuan pelaksanaan kedua POJK lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 88).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman OJK tidak memuat catatan perubahan/pencabutan POJK 8/2023 per 17–11–2026; belum dicek apakah ada POJK perubahan sesudahnya.
- Ketentuan pelaporan ke PPATK (LTKM, LTKT, transfer dana) diatur peraturan PPATK, tidak dirangkum di sini.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK.aspx

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/ABSTRAK POJK 8 TAHUN 2023 - PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPSPM DI SJK.pdf

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/FAQ POJK 8 TAHUN 2023 - PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPSPM DI SJK.pdf

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/POJK 8 TAHUN 2023 - PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPSPM DI SJK.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.